

Trump Berang Indonesia Tetap Pajaki Google Dkk

Pungutan PPh atas transaksi digital masih jadi bahasan alot di forum OECD. Pasalnya, ada negara yang ketakutan akan berkurangnya pendapatan PPh karena harus berbagi dengan negara lain.

MILHAM RA
ilham@mediaindonesia.com

MENTERIKUANGAN Sri Mulyani memastikan Indonesia akan tetap memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada setiap barang dan jasa digital dari luar negeri. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Juli 2020.

Penegasan itu disampaikan Ani, demikian Menkeu akrab disapa, sekali pun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berang lantaran perusahaan-perusahaan digital asal negara tersebut, seperti Facebook, Google, Zoom, hingga Netflix, akan dipajaki.

Menurut Ani, apa yang dikhawatirkan AS ialah adanya pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas perusahaan digital luar negeri yang berasal dari 'Negeri Paman Sam' tersebut. Padahal yang ingin dilakukan Indonesia ialah memungut PPN atas transaksi digital.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"PMK No 48/PMK.03/2020 itu mengatur PPN bagi subjek pajak luar negeri atau subjek yang selama ini tidak bisa kita mintai untuk ikut memungut dan mengumpulkan PPN, karena dia berdomisili di luar negeri, tapi servis di sini. Contoh Netflix, dia ada servis ke sini, namun keberadaannya tidak dalam yurisdiksi Indonesia," kata Ani dalam konferensi pers APBN KITA secara virtual, kemarin.

"Melalui Perppu No 1/2020, PMK, dan Perdirjen, sekarang subjek pajak luar negeri bisa menjadi pemungut dan pengumpul untuk disampaikan ke pemerintah Indonesia. PPN itu bukan subjek dari suratnya dari USTR (United State Trade Representative/ perwakilan dagang). USTR itu memperlakukan PPh, sedangkan ini merupakan subjek dari pembicaraan di OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)," sambung Ani.

Ia menambahkan, pungutan PPh atas transaksi digital memang masih jadi bahasan yang alot di forum OECD. Pasalnya, jika pungutan PPh digital diterapkan, akan muncul kemungkinan berkurangnya penda-

patan negara perusahaan asal karena harus ada pembagian jatah pungutan PPh kepada negara di tempat perusahaan tersebut mendapatkan penghasilan.

Prinsip kehadiran fisik (physical presence) masih menjadi syarat utama yang dipergo beberapa negara dalam penerapan pemungutan PPh. Namun, di sisi lain, beberapa negara berpendapat untuk menarik PPh, bisa diterapkan syarat kehadiran ekonomi (economic presence) tanpa harus ada kehadiran fisiknya.

Karena itu, Ani menegaskan langkah yang diambil pemerintahan Trump sama sekali tidak terkait dengan penerapan pemungutan PPN digital yang akan dilakukan Indonesia.

"PPN itu tidak ada dispute, karena PPN yang bayar ialah orang yang menikmati. Ditambah dengan adanya wabah covid-19 ini, semua pindah ke digital. Jadi itu harus disikapi dari sisi perpajakan," terangnya.

Cari pemungut

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan saat ini pemerintah tengah melakukan diskusi bersama perusahaan-perusahaan luar negeri yang bertransaksi secara digital di Indonesia. Tujuannya, untuk mencari siapa yang dapat memungut PPN tersebut.

"Harapannya mulai Juli besok sudah ada yang kami tunjuk sebagai pemungut. Sehingga di Agustus 2020, mereka bisa lakukan pemungutan," pungkash Suryo. (E-2)



ERA KENORMALAN BARU RESTORAN: Karyawan mengantar makanan pelanggan di salah satu restoran di Plaza Marina, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Sejumlah restoran dan rumah makan di Surabaya mulai membuka layanan makan di tempat dengan protokol kesehatan ketat setelah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah itu memasuki masa transisi menuju era kenormalan baru.

ANTARA/ZABUR KARIRU

Kementerian BUMN Bidik Anak Perusahaan Bodong

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus memangkas anak-cucu perusahaan BUMN sebagai upaya penyehatan dan perbaikan kondisi internal BUMN. Kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu tengah memilah 800 perusahaan BUMN untuk dicari mana yang harus dibubarkan.

"Kita punya strategi besar. Jadi di pemilahan itu kita bikin empat kuadran," kata Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulingga dalam diskusi virtual, kemarin.

Pada kuadran pertama, kata dia, berisi perusahaan BUMN yang memang difokuskan cari

untung agar negara punya dividen, seperti Bank Mandiri, Bank BNI, dan sebagainya.

Kuadran kedua, berisi perusahaan-perusahaan yang cari untung juga melayani masyarakat, contohnya BRI, Pertamina, dan PLN. Kuadran tiga, tugasnya hanya untuk melayani masyarakat seperti PT Pupuk dan Bulog.

"Di kuadran empat, ini perusahaan enggak cari untung, juga enggak melayani masyarakat. Jadi bubarkan saja ya," ucap Arya.

Ia mengatakan, pada kuadran keempat itu banyak anak perusahaan yang tak memiliki peran di masyarakat.

"Jadi begini, ada produk baru, mereka bikin perusahaan. Ada proyek baru, bikin perusahaan. Jadi bikin perusahaan terus. Meski proyek sudah selesai, anak perusahaan tetap masih ada," lanjut Arya.

Alhasil, sambungnya, banyak perusahaan bodong yang artinya tidak memiliki proyek, bahkan mungkin direksinya sudah tak ada, tapi nama perusahaannya masih ada.

Di diskusi yang sama, Sinergi Kawal BUMN menyayangkan masih adanya penggiringan opini negatif atas langkah penyehatan yang tengah dilakukan Kementerian BUMN.

Inisiator Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman, mengatakan ada upaya mengintervensi Menteri BUMN untuk membatalkan kebijakan itu.

"Saya melihat dinamika belakangan ini, terkait BUMN, adanya semacam upaya intervensi. Sangat disayangkan sudah ada upaya untuk mengganggu," kata Arief.

Pandangan yang sama disampaikan Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia Edi Homaidi. Ia mengatakan langkah Erick Thohir itu sebagai bentuk pemersihan terhadap segelintir orang yang hanya memboroskan keuangan negara. (Wan/E-2)



DOK JP PP

KUNJUNGI PARK HOTEL JAKARTA: Komisaris Utama PT PP (Persero) Andi Gani Nena Wea (kedua dari kanan) didampingi Direktur Utama Novel Arsyad (kanan) melihat langsung persiapan Park Hotel Jakarta, Senin (15/6). Kunjungan kerja tersebut untuk melihat langsung persiapan manajemen dalam rangka pembukaan kembali bisnis perhotelan di era kenormalan baru.

Menhub Yakin Covid-19 Satu Gelombang

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini pandemi covid-19 hanya satu gelombang, tidak akan ada gelombang kedua dan akan berakhir pada September mendatang.

"Kami dari sektor perhubungan selalu menjadikan kesehatan itu panglima. Tidak bisa dibayangkan seperti yang terjadi sekarang di Beijing ada second wave (gelombang kedua). Kita tak ingin itu terjadi. Presiden (Joko Widodo) bilang kalau kita bisa ini cuma sekali gelombang dan kita selesai September. Insya Allah," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam diskusi daring yang bertajuk Antisipasi dan Adaptasi Dunia Usaha Transportasi dalam Kenormalan Baru di Jakarta,

kemarin.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar masyarakat dan seluruh elemen tidak larut dalam pandemi covid-19.

"Di satu sisi kesehatan ialah panglima yang harus kita jaga. Tetapi, kita punya amanah lain. Kita punya tugas-tugas lain, kita harus bertahan, kita tidak boleh terkapar," katanya.

Saat ini, lanjut dia, sudah memasuki adaptasi normal baru dengan hal yang baru terjadi, karena itu harus diawasi dan dipatuhi bersama-sama.

"Kita memang masuk satu era yang namanya adaptasi baru. Suatu adaptasi yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bikin feasibility study (studi kelayakan), tidak pernah ada justifikasinya

Keberhasilan dalam membasmi covid-19 juga ada di tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat.

apa yang harus kita lakukan, tapi harus kita lakukan. Oleh karena itu, adaptasi baru ini harus kita endorse dan awasi sama-sama," katanya.

Di sektor perhubungan, ia menyebutkan okupansi menurun yang berpengaruh juga terhadap pendapatan yang merosot. Karena itu, Budi

mengatakan pihaknya tengah membahas permasalahan tarif dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Tidak mungkin Kemenkes sendiri, tidak mungkin kami Kemenhub sendiri. Oleh karenanya hierarki ada di gugus tugas. Saya sedang bahas tarif dan data-data transportasi," katanya.

Budi menambahkan keberhasilan dalam membasmi covid-19 juga ada di tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per 16 Juni 2020, terkonfirmasi sebanyak 40.400 kasus dengan tambahan 1.106 kasus, 22.466 dirawat, 15.703 sembuh, dan 2.231 meninggal. (Ant/E-3)



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pengumuman untuk Rapat dilakukan dengan cara memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, melalui situs web Bursa Efek dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pengumuman untuk Rapat dilakukan dengan cara memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, melalui situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia (Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik IDX dan OJK) dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Sintarima Gunita pada tanggal 1 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 1 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan.

Setiap usul Para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi.

Jakarta, 17 Juni 2020
PT Paramita Bangun Sarana Tbk
Direksi Perseroan

PT SELAMAT SEMPERNA Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, jam 09.00 BBTW di Wisma ADR - Lantai 9, Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, DKI Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 17 dan 52 POJK No.15/2020 dan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan; atau Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif PT KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 pukul 16.00 BBTW.

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Setiap usul pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No.15/2020, yakni diusulkan secara tertulis oleh pemegang saham yang merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu perduapuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yaitu Kamis, tanggal 25 Juni 2020.

Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih/bingkisan produk selama penyelenggaraan Rapat. Perseroan akan melaksanakan Rapat dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat yang ditetapkan Pemerintah, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 17 Juni 2020
Direksi



PENGUMUMAN TENDER TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI METODE SATU TAHAP SATU SAMPLU "Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Protection System) Gedung PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan" Nomor Dokumen Tender : 013.RKS/DAN.01.03/B29000/2020

Selubungan dengan nota dinas GM Nomor 1375/DAN.01.02/GM/2020-R tanggal 22 Mei 2020 perihal Penetapan dan/atau Pengesahan Dokumen RKS dan Metode Pengadaan Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Protection System) Gedung PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan, Pejabat Pelaksana Pengadaan PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan akan melaksanakan Tender Terbuka dengan Metode Satu Tahap Satu Sampul dengan Pascakualifikasi untuk paket pengadaan pekerjaan Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Protection System) Gedung PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Sistem Pemadam Kebakaran (Fire Protection System) Gedung PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan
Sumber pendanaan : APLN Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022
Nilai Paket Pekerjaan : Rp.15.499.901.718,00 sudah termasuk PPN 10%.

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen Tender/RKS
Tanggal : 17 s.d. 23 Juni 2020
Waktu : 09.00 s.d. 15.00 WIB hari kerja
Tempat : Ruang Kenanga Lantai 1 Gedung PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan, Jln. K.S. Tubun I/2 Kota Bambu Selatan, kec. Palmerah Jakarta Barat 11420.

* Calon Penyedia Barang/Jasa harus terdaftar sebagai rekanan di e-Procurement PLN. Persyaratan dan Jadwal Pelaksanaan Tender selengkapnya dapat dilihat di Berita e-Procurement pada <https://eproc.pln.co.id/portal/homepage> pada menu berita dan papan pengumuman lobby Lantai 1 Gedung PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan.

Jakarta, 17 Juni 2020.
Pejabat Pelaksana Pengadaan